



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA ARDIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. MENTENG
3. NHK : 863726

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.049.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/430 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 780 m2/780 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 71.500.000
3. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/102 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.000.000
7. Tanah Seluas 341 m2 di KAB / KOTA BOGOR, LAINNYA Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/210 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.600.000.000
9. Tanah Seluas 258 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 77.400.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/294 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 108.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3G GMMFJJ Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA P5E02R22M1MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 781.000.000

Sub Total Rp. 6.997.300.000

III. HUTANG Rp. 2.473.275.903

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.524.024.097

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.